



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 22-A TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1 / 26 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 02/F.PPP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi DPRD dari Fraksi PPP, maka sesuai Pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/26 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 172.1/26 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

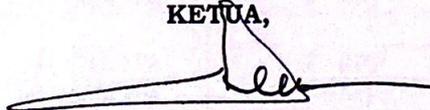
PERTAMA : Merubah **Angka 1. Komisi A No. Urut 9, Angka 2. Komisi B No. Urut 10, dan Angka 4. Komisi D No. Urut 8** pada lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/26 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

K E D U A : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah Keanggotaan Komisi dari unsur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : 20 Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 22-A Tahun 2015
Tanggal : 20 Oktober 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	FATKHUR ROHMAN, SH	WAKIL KETUA	F. PKB
3	ACARA ARIANI, S.Psi	SEKRETARIS	F. NURANI NASDEM
4	JUNAENAH	ANGGOTA	F. PDI.P
5	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
6	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
8	TUHLAN	ANGGOTA	P. PD
	Semula :		
9	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	M. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
10	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PAN PKS

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	EDI SISWANTO, S.Sos	KETUA	F. PD
2	KHOMIDAH, S.Pd.I	WAKIL KETUA	F. NURANI NASDEM
3	MAULANA YUSUP, S.IP	SEKRETARIS	F. PKB
4	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
6	I'ANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
7	A LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
9	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
	Semula :		
10	MUH. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
11	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS

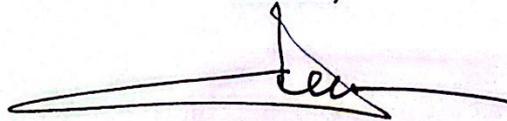
3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. SUNARTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	TEGUH	WAKIL KETUA	F. PD
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	SEKRETARIS	F. PKB
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
5	JUNAEDI	ANGGOTA	F. PDI.P
6	BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. PG
7	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PG
8	H. NURFAIZIN, S.Ag	ANGGOTA	F. PPP
9	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
10	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	F. PAN PKS

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	SUUDI, S.Ag	KETUA	F. PKB
2	H. TOFANI DWI ARIYANTO, SH	WAKIL KETUA	F. PDI.P
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	SEKRETARIS	F. PD
4	PAJIMAN	ANGGOTA	F. PDI.P
5	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PKB
6	TRIYANTO	ANGGOTA	F. PG
7	SRI UMAMI	ANGGOTA	F. PG
	Semula :		
8	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
9	KARMUBIT	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
10	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



I. TEGUH RAHARJO



PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.1/ 22-A TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR : 172.1 / 26 TAHUN 2014 TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 02/F.PPP/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015, perihal Perubahan Susunan Keanggotaan Komisi DPRD dari Fraksi PPP, maka sesuai Pasal 52 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/26 Tahun 2014 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 Seri E Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2004 Nomor 8 Seri E Nomor 3), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 8 Seri E Nomor 5);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;

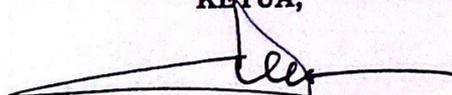
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 172.1/26 TAHUN 2014 TENTANG PERESMIAN PENETAPAN SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.

- PERTAMA** : Merubah **Angka 1. Komisi A No. Urut 9, Angka 2. Komisi B No. Urut 10, dan Angka 4. Komisi D No. Urut 8** pada lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 172.1/26 Tahun 2014 tentang Peresmian Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA** adalah Keanggotaan Komisi dari unsur Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batang
pada tanggal : Oktober 2015

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



H. I. TEGUH RAHARJO

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 22-A Tahun 2015
Tanggal : 20 Oktober 2015

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

1. KOMISI A :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	H. PURWANTO, S.IP	KETUA	F. PDI.P
2	FATKHUR ROHMAN, SH	WAKIL KETUA	F. PKB
3	ACARA ARIANI, S.Psi	SEKRETARIS	F. NURANI NASDEM
4	JUNAENAH	ANGGOTA	F. PDI.P
5	DARYOSO, S.Pd.I	ANGGOTA	F. PKB
6	RUSTIASIH	ANGGOTA	F. GERINDRA
7	ISTIKHANAH	ANGGOTA	F. PG
8	TUHLAN	ANGGOTA	P. PD
	Semula :		
9	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	M. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
10	H. JUKI JS	ANGGOTA	F. PAN PKS

2. KOMISI B :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
1	EDI SISWANTO, S.Sos	KETUA	F. PD
2	KHOMIDAH, S.Pd.I	WAKIL KETUA	F. NURANI NASDEM
3	MAULANA YUSUP, S.IP	SEKRETARIS	F. PKB
4	Drs. RIHARSO	ANGGOTA	F. PDI.P
5	SLAMET SUPRIYADI, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
6	I'ANATUL FIKRIYA	ANGGOTA	F. PKB
7	A LU'AYYIL FATA	ANGGOTA	F. GERINDRA
8	DANANG AJI SAPUTRA, ST	ANGGOTA	F. PG
9	Hj. NUR KHASANAH	ANGGOTA	F. PD
	Semula :		
10	MUH. NUR IMANULLAH	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
11	H. YUSWANTO, BA	ANGGOTA	F. PAN PKS

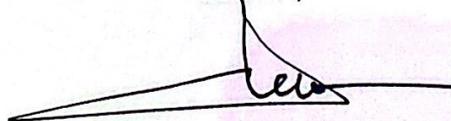
3. KOMISI C :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
		KETUA	F. PDI.P
1	H. SUNARTO, S.IP	WAKIL KETUA	F. PD
2	TEGUH	SEKRETARIS	F. PKB
3	KUKUH FAJAR RHOMADHON, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
4	H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	ANGGOTA	F. PDI.P
5	JUNAEDI	ANGGOTA	F. PG
6	BENNY ABIDIN, SH	ANGGOTA	F. PG
7	SUBAKIR	ANGGOTA	F. PPP
8	H. NURFAIZIN, S.Ag	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
9	H. MU'AFIE	ANGGOTA	F. PAN PKS
10	TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	ANGGOTA	

4. KOMISI D :

NO.	NAMA	JABATAN	UNSUR FRAKSI
		KETUA	F. PKB
1	SUUDI, S.Ag	WAKIL KETUA	F. PDI.P
2	H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	SEKRETARIS	F. PD
3	TEGUH LUMAKSONO, SE	ANGGOTA	F. PDI.P
4	PAJIMAN	ANGGOTA	F. PKB
5	H. EDRUS	ANGGOTA	F. PG
6	TRİYANTO	ANGGOTA	F. PG
7	SRI UMAMI	ANGGOTA	F. PPP
	Semula :		
8	KH. ZAENAL FAIZIN	ANGGOTA	F. PPP
	Menjadi :		
	SRI WAHYU WIDAWATI, SE	ANGGOTA	F. PPP
9	KARMUBIT	ANGGOTA	F. NURANI NASDEM
10	Drs. SIDQON HADI	ANGGOTA	F. PAN PKS

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
KETUA,**



I. TEGUH RAHARJO